

# AGAMA DAN KETAHANAN NASIONAL: HUBUNGAN ISLAM DENGAN ABRI SEBAGAI FUNDAMENTAL POLITIK

Z.A. Maulani

*Definisi ketahanan nasional adalah "suatu kondisi dinamik bangsa, yang meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional". Konsep ketahanan nasional mirip dengan pengertian imunitas pada sistem tubuh manusia. Imunitas tubuh akan mampu menolak masuknya berbagai penyakit yang dapat melemahkan kesehatan tubuh atau yang dapat berakibat fatal terhadap nyawa manusia. Kita juga mengetahui imunitas akan tetap prima bila ketentuan-ketentuan tentang cara menjaga kesehatan tubuh tetap diperhatikan.*

Sebagai suatu bangsa yang majemuk ada kaidah-kaidah dasar yang perlu diperhatikan guna memelihara skala ketahanan nasional yang prima. Kondisi internal bangsa yang majemuk seperti Indonesia mengandung di dalamnya faktor-faktor bukan hanya yang memperkuat, tetapi juga yang dapat memperlemah yang dapat berkembang menjadi potensi ancaman bagi ketahanan nasional. Kemajemukan masyarakat sebagaimana yang dimiliki bang-

sa Indonesia, terlebih-lebih, akan menghadapi tantangan yang serius dalam era globalisasi. Hal ini karena proses kesejagatan bukan hanya berperan mendorong integrasi umat manusia, seperti kian meningkatnya kesadaran akan kepentingan bersama seperti pada lingkungan hidup, kesejahteraan ekonomi,

---

*Mayjen TNI (Purn.) pernah menjabat Pangdam Tanjung Pura, Sesjen Departemen Transmigrasi dan sekarang Penasehat Manristek Bidang Hankam.*

perjuangan untuk keadilan, kesamaan gender, dan sebagainya, tetapi proses globalisasi yang berlangsung itu pada saat yang bersamaan juga mendorong kecenderungan meningkatnya pluralisasi dalam masyarakat. Proses pluralisasi yang kian kuat merupakan akibat logis dari serbuan informasi yang tak terbendung sebagai salah satu faktor eksternal terpenting bersamaan dengan kian meningkatnya arus mobilitas manusia, barang, jasa, gagasan, dan sebagainya, yang membawa serta pandangan dan gaya hidup baru sebagai akibat proses menciutnya dunia yang tidak lagi mengenal tapal batas.

Salah satu dari berbagai faktor internal yang dapat mendorong maupun mengendalikan dampak dari proses yang berperan memperbesar diferensiasi sosial dan pluralisasi masyarakat tadi adalah faktor agama, sebagaimana yang tampak pada kasus India, Irlandia Utara, Kanada, Yugoslavia, dan bekas republik-republik Uni Sovyet di Asia Tengah. Agama mempengaruhi kesadaran terdalam pada diri manusia, yang sebagai suatu potensi sumber konflik pengelolannya jauh lebih muskil daripada pengelolaan sengketa yang berdasar pada kepentingan politik. Perbedaan kepentingan dalam politik masih membuka peluang untuk kompromi. Pada

konflik yang berlatar belakang nilai-nilai agama, koridor untuk kompromi tertutup sama sekali.

Bagi Indonesia, faktor agama menjadi sangat menentukan mengingat masyarakat Indonesia yang religius. Meski Indonesia patut berbangga memiliki kelima agama-agama besar dunia, Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu dan Budha, namun dilihat dari proporsi yang ada, umat Islam merupakan mayoritas yang membentuk 85% dari seluruh penduduk Indonesia. Posisi itu menempatkan umat Islam sebagai kelompok yang menentukan bagi legitimasi setiap kekuasaan politik. Karena itu, siapa pun yang melakukan studi politik di Indonesia pada umumnya, dan mengenai ketahanan nasional pada khususnya, tidak mungkin mencapai obyektivitas tanpa pengkajian mengenai peran politik umat Islam tersebut.

Kekuatan politik kedua terpenting di Indonesia adalah ABRI. Peran ABRI dalam kehidupan politik sejak awal kemerdekaan, kini, maupun masa yang akan datang tetap akan penting dan patut diperhitungkan setiap wacana tentang ketahanan nasional.

Diskusi yang ingin dikembangkan adalah tentang umat Islam dalam aspeknya sebagai suatu entitas budaya, yang memiliki sistem moral, etika, dan

sikap politik, dalam hubungannya dengan ketahanan nasional. Sebagai entitas budaya umat Islam terdiri dari kelompok-kelompok yang relatif independen satu dengan yang lain oleh latar belakang aliran dan paham keagamaan, pandangan politik serta tingkat perkembangan budaya. Secara umum umat Islam merupakan kelompok sosial yang tidak terorganisasi yang terikat secara longgar oleh nilai-nilai universal Islam, yang berperan menyatukan mereka tatkala nilai-nilai tersebut menghadapi ancaman dari luar. Sebaliknya ABRI adalah kekuatan sosial politik yang terorganisasi rapi, solid, dan berdisiplin. Kualitas hubungan dan interaksi antara kedua kekuatan tersebut, berdasarkan pengamatan empirik, ternyata berpengaruh besar terhadap kualitas dan skala ketahanan nasional di masa yang silam.

### **Periode 1945 - 1949: Tentara Nasional pimpinan "Santri"**

Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, pemerintah tidak memperlihatkan sikap yang jelas mengenai perlunya membentuk suatu tentara nasional bagi republik yang masih bayi itu. Para pemuda yang tidak sabar melihat gelagat kehadiran pasukan Sekutu yang diboncengi

oleh NICA mulai mempersenjatai diri mereka. Dengan itu terbentuk lasykar-lasykar rakyat bersenjata yang menghimpun diri berdasar latar belakang aliran, paham politik dan kedaerahan masing-masing. Dengan latar belakang yang primordialistik dalam cara pembentukan lasykar-lasykar itu, lahirlah Barisan Banteng yang menampung pemuda kalangan nasionalis, Pesindo (Pemuda Sosialis — yang di kemudian hari didominasi oleh kaum komunis), Hizbullah dan Sabilillah bagi pemuda kalangan Islam, juga lasykar-lasykar bersenjata berlatar belakang kedaerahan seperti KRIS (Kesatuan Rakyat Indonesia Sulawesi), Lasykar Rakyat Kalimantan, dan sebagainya.

Menyadari kenyataan meruyaknya konflik fisik antara rakyat dengan Sekutu dan NICA yang kian meningkat, pada 5 Oktober 1945, pemerintah akhirnya mengeluarkan Maklumat No. 1, yang isinya menyatakan terbentuknya BKR - "Badan Keselamatan Rakyat". Dilihat dari rumusan tugasnya yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keselamatan rakyat. BKR pada dasarnya bukanlah suatu organisasi tentara. Inti pimpinan BKR terdiri dari mantan opsir PETA, KNIL sebelum perang, dan Heiho. Jumlah terbesar berasal dari opsir PETA, satuan

militer bersenjata ringan yang sepenuhnya terdiri dari personil pribumi yang dibentuk Jepang pada awal 1944. Untuk mendapatkan dukungan politik terhadap PETA, tokoh-tokoh pemimpinnya direkrut dari kalangan agama, sedang para opsir bawahannya pemuda dari kalangan priyayi.<sup>1</sup> Dari latar belakang sosial yang dikemukakan di atas, dapat dipahami mengapa sebagian besar para komandan divisi dan resimen BKR (kemudian menjadi TKR 'Tentara Keamanan Rakyat' dan seterusnya TNI, 'Tentara Nasional Indonesia') berasal dari kalangan pemuka umat Islam. Tokoh puncak TNI, Panglima Besar Soedirman, adalah seorang mantan guru sekolah Muhammadiyah.

Meskipun dengan latar belakang itu sikap Panglima Besar Soedirman terhadap tentara resmi dan lasykar tetap berusaha bersikap adil, yang menurut Salim Said, karena sikapnya yang memandang keduanya sebagai "anak-anaknya".<sup>2</sup> Sikap Soedirman yang tetap berusaha memelihara jarak yang sama terhadap kekuatan-kekuatan yang ada juga turut membantu terbinanya

hubungan yang baik antara TNI dengan kelompok Islam dan kekuatan-kekuatan politik lainnya.

Hubungan yang baik itu terbukti memberikan arti yang besar ketika TNI harus menyelesaikan pemberontakan PKI di Madiun. Ketika pemberontakan itu pecah pada bulan September 1948 yang diprakarsai oleh Front Demokrasi Rakyat/PKI dan didukung oleh kekuatan lasykar bersenjata Pesindo, TNI berhasil mematahkannya dalam waktu yang singkat dengan dukungan dari kekuatan lasykar dan umat Islam. Tentang kegagalan PKI di Madiun itu, dalam suatu dokumen otokritik yang disusun pada 1950 untuk menyiapkan kebangkitan kembali partai, Aidit menyalahkan Soemarsono, seorang tokoh pemimpin Pesindo/PKI, yang dituduhnya telah menyeret partai terjebak ke dalam petualangan yang mengakibatkan kehancuran partai. Analisis yang lebih obyektif menyimpulkan, kegagalan PKI di Madiun secara politik dan militer lebih banyak disebabkan karena ketidaksiapan PKI secara militer berhadapan dengan TNI, selain tidak mendapatkan dukungan dari mayoritas rakyat, yaitu kelompok Islam, yang waktu itu melihat munculnya komunisme sebagai ancaman terhadap nilai-nilai Islam yang mereka anut.

<sup>1</sup> Joyce C. Lebra, *Tentara Gemblengan Jepang*. Pustaka Sinar Harapan, 1988, h. 114.

<sup>2</sup> Salim Said, *Genesis of Power*, Pustaka Harapan, Jakarta, 1992, h. 66.

## Periode 1950 - 1959 - Exodus Perwira 'Santri'

Sesudah berakhirnya Perang Kemerdekaan terjadi perubahan besar pada komposisi lapisan pimpinan TNI, terutama karena menyusutnya jumlah anggota TNI berlatar belakang santri. Ada tiga penyebab utama keluarnya para prajurit santri dari TNI:

Pertama, dengan berakhirnya perjuangan bersenjata dan republik mulai memasuki fase baru, yaitu fase pembangunan, kaum santri yang berjuang di dalam TNI merasa kewajiban mereka berjihad dengan senjata telah usai. Mereka merasa sudah waktunya untuk kembali ke masyarakat dan membenahi kehidupan umat serta menghidupkan lagi pesantren-pesantren yang selama ini terbengkalai. K.H. Wahid Hasjim kembali ke Tebu Ireng, Mr. Kasman Singodimedjo kembali menggeluti kegiatan dakwah dan sosial, demikian juga yang lain-lain.

Kedua, kekuatan TNI yang sangat besar sebagai akibat mobilisasi rakyat selama Perang Kemerdekaan menimbulkan beban anggaran belanja yang berat bagi negara. Seusainya perang gerilya prioritas berubah pada pembangunan. Memasuki masa damai tentara yang besar tidak lagi diperlukan. Untuk itu

TNI melakukan demobilisasi dan rasionalisasi. Dengan dukungan Wakil Presiden Mohammad Hatta pimpinan TNI memutuskan untuk meningkatkan profesionalisme korps perwira TNI untuk membangun TNI menjadi suatu kekuatan pertahanan yang handal dan profesional menghadapi tantangan masa depan. Oleh karena itu, suatu skema pendidikan dibangun, mulai dari pendidikan pembentukan perwira (PPAD, Pusat Pendidikan Perwira - AD), sampai pada sekolah untuk para komandan resimen (SSKAD yang kemudian menjadi SESKOAD).

Sesuai kesepakatan dengan pemerintah Belanda, para pelatih untuk berbagai pendidikan tersebut dijalankan oleh NMM (*Nederlandse Militaire Missie*). Selain itu sejumlah kader yang berasal dari pemuda pejuang dikirim ke negeri Belanda untuk mendapat pendidikan formal di KMA (*Koninklijke Militaire Academie*) Breda, beberapa perwira ke Amerika Serikat dan Inggris. Mereka yang tidak berhasrat untuk mengikuti program "pendidikan ulang" tersebut dipersilakan memilih antara tetap meneruskan dinas aktif atau dide-mobilisasi ke masyarakat. Karena alasan bahasa, atau alasan-alasan lain, banyak di antara para perwira "santri" yang kemudian memilih demobilisasi

ketimbang mengikuti pendidikan ulang. Rasionalisasi lalu kebijaksanaan pendidikan, keduanya turut berperan mendorong perwira "santri" memilih meninggalkan dinas aktif ketentaraan. Yang bertahan dan mampu mengikuti program pendidikan karier militer profesional terdiri dari para perwira muda yang pada umumnya memiliki latar belakang pendidikan umum negeri pada zaman Belanda atau Jepang (sebagian besar mereka masih berbahasa Belanda dalam pergaulan sehari-hari) dari kalangan priyayi abangan. Perubahan latar belakang sosial ini dalam perkembangan kehidupan politik Indonesia di kemudian hari ternyata telah turut mewarnai sikap "salah paham" lapisan pimpinan ABRI kepada gerakan politik Islam dan kaum muslimin pada khususnya, yang berdampak pada kualitas hubungan antara ABRI dengan ummat Islam.<sup>3</sup>

Ketiga, seusainya perang gerilya, partai-partai politik yang ada terjebak ke dalam konflik-konflik yang meletihkan memperebutkan kekuasaan. Konflik itu bukan hanya membenam politisi sipil dalam kegaduhan yang tak berkesudahan, dan tan-

pa dapat dihindari juga merembes ke dalam tubuh TNI. Apalagi disiplin dan kekompakan tentara pada masa itu memang merupakan suatu masalah yang masih harus dibenahi. Dalam hal seperti itu sudah tentu sulit dihindari bila ada perwira yang mengambil sikap sendiri yang tidak selalu sejalan dengan kebijakan pimpinan TNI. Beberapa komandan bersama dengan anak buah mereka tergelincir melakukan pemberontakan, masing-masing dengan alasan dan motivasi yang berbeda-beda, seperti misalnya salah seorang tokoh pendiri ALRI Divisi IV/Kalimantan, Ibnu Hajar; lalu Kahar Muzakkar di Sulawesi, dan pemberontakan Batalyon 426 di Jawa Tengah.

Berbagai pergolakan bernuansa politik tersebut juga turut berpengaruh membuat kian susutnya jumlah, dan pada gilirannya merosotnya peran kepemimpinan para "perwira santri" di dalam TNI. Keadaan itu diperburuk oleh pengalaman getir TNI dalam menghadapi pemberontakan DI/TII di berbagai daerah di Indonesia, dari Aceh, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, sampai Sulawesi Selatan, selama 16 tahun. Demikian pula tuduhan bahwa tokoh-tokoh partai politik Islam Masjumi (bersama dengan PSI) ada di belakang pemberontakan PRRI telah menim-

<sup>3</sup> H. Hartono Mardjono, S.H., *Politik Indonesia (1996 - 2003)*, Gema Insani Press, Jakarta, 1966.

bulkan kenangan yang tidak menguntungkan dalam hubungan ABRI dengan umat Islam pada periode 1950 dan periode selanjutnya.

Namun bagaimanapun juga, pada periode 1950-1959 pertentangan politik secara terbuka antara TNI dengan kekuatan politik Islam belum terlalu kentara. Terlebih-lebih dalam berbagai pertentangan antara TNI dengan kekuatan politik sipil yang ada, kelompok Islam memperlihatkan dukungan mereka yang nyata kepada TNI. Misalnya tatkala terjadi pertentangan antara TNI dengan beberapa anggota Parlemen koalisi eksfederalis dan kelompok kiri yang terlalu mencampuri urusan intern TNI, tampilnya mosi Natsir yang mendukung TNI melawan mosi Baharuddin dan kawan-kawan, memberikan keyakinan kepada TNI akan dukungan kelompok Islam dalam pertentangannya melawan kaum kiri dan komunis.

### **Periode 1959-1965: Demokrasi Terpimpin**

Selama periode ini terjadi perkembangan yang berpengaruh besar terhadap kehidupan politik di tanah air. Sidang Konstituante yang bertugas merumuskan dasar negara Indonesia menemui jalan buntu tat-

kala faksi-faksi yang ada tidak juga berhasil mencapai kompromi. Kebuntuan Sidang Konstituante yang menjurus kepada perpecahan politik memberikan justifikasi kepada tuntutan tentara untuk kembali ke UUD-1945 yang pernah dicetuskan sejak pecahnya peristiwa 17 Oktober 1952.

Berdasarkan memoar Jenderal A.H. Nasution dengan perkembangan situasi baru tersebut, Presiden Soekarno pada akhir Oktober 1958 menyetujui usulan tentara untuk kembali ke UUD-1945.<sup>4</sup> Gagasan kembali ke UUD-1945 itu menggelinding laksana bola salju. PNI memberikan dukungannya pada Januari 1959, disusul oleh PKI; NU yang semula ragu-ragu akhirnya juga memberikan dukungannya, kecuali Masjumi dan PSI.

Persetujuan dan penolakan oleh berbagai kekuatan politik tersebut terhadap gagasan kembali ke UUD 1945 didasarkan pada pertimbangan kepentingan masing-masing. TNI melihat kembali ke UUD 1945 sebagai jalan untuk mengakhiri pertikaian politik yang tak berkesudahan; Presiden Soekarno menyetujui kembali ke UUD-1945 karena mengalami keadaan tidak berdaya mengendalikan arah politik dalam kedudukannya sekedar sebagai *figure-head* dalam sistem kabinet parlemen-

ter; sedang Masjumi dan PSI menolak karena beranggapan UUD-1945 tidak menguntungkan bagi perkembangan demokrasi.

Tidak lama akibat penolakan mereka itu partai Masjumi dan PSI dibubarkan. Tersingkirnya Masjumi dan PSI dari panggung politik nasional memberikan peluang kepada PKI untuk membangun kekuatannya. Dengan dukungan dari Presiden Soekarno melalui konsep Nasakom, serta penyusupan ke berbagai organisasi kemasyarakatan, intimidasi, dan teror terhadap lawan-lawan politiknya di segala bidang kehidupan, PKI berhasil membuat lawan-lawannya lumpuh tidak berdaya. Satu-satunya kekuatan politik yang tetap memberikan perlawanan kepada PKI adalah TNI yang didukung terutama oleh kelompok-kelompok Islam dan kekuatan antikomunis lainnya.

Strategi PKI untuk merebut kekuasaan politik didasarkan pada peran Aidit yang dituangkannya ke dalam suatu dokumen berjudul MIRI (Masyarakat Indonesia dan Revolusi Indonesia) yang diterbitkan pada 1957. Dokumen tersebut memuat analisis tentang struktur masyarakat Indonesia sebagai dasar perkiraan sosiopolitik guna mendukung metode pencapaian kekuasaan politik. Analisis Aidit ditu-

tup dengan suatu kesimpulan tentang cara pencapaian apa yang disebutnya sebagai "tujuan revolusi (komunis) Indonesia", yaitu *naar het politieke macht* - menuju kekuasaan politik. Menurut analisis Aidit, pada negara dan masyarakat agraris seperti Indonesia, tahapan strategis pertama yang harus ditempuh oleh partai ialah mengusahakan untuk menguasai 60.000-an desa yang ada di Indonesia, terutama di Jawa. Metode berpikir Aidit sangat dipengaruhi oleh pemikiran Mao - "strategi desa-desa mengepung kota".

Yang dilupakan Aidit - Indonesia bukan Cina. Di sini terdapat mayoritas masyarakat Islam yang memiliki budaya dan nilai-nilai yang telah berkembang paling tidak selama tujuh ratus tahun ini. Kealpaan itu mengakibatkan gagalnya pemberontakan G-30-S, dan PKI dihancurkan oleh ABRI yang didukung umat Islam, yang selama Orde Lama menjadi kelompok yang paling menderita oleh penindasan kaum komunis dan kekuatan kiri lainnya. Kesalahan fatal PKI ialah melecehkan nilai-nilai Islam, dan dengan itu menyatupadukan umat Islam yang terdiri dari berbagai paham dan aliran agama maupun politik.

## Periode Orde Baru

Berbagai gangguan terhadap stabilitas yang mencerminkan menurunnya skala ketahanan nasional terjadi beberapa kali selama periode Orde Baru. Kerusuhan pertama yang cukup berarti adalah Peristiwa 15 Januari 1974, yang lebih dikenal dengan nama Malari. Kerusuhan kedua yang hampir seluas Malari adalah Peristiwa 27 Juli 1996. Demikian juga telah terjadi berbagai kerusuhan sosial dalam skala lebih kecil yang terjadi di berbagai kota di Indonesia baik menjelang, selama, maupun sesudah Pemilu 1997.

Berbagai jenis kerusuhan tadi, baik yang bertujuan mencoba menggoyang pemerintah yang sah, maupun kerusuhan yang merupakan protes sosial terhadap kondisi yang ada, tidak mampu meluas menjadi kerusuhan yang berskala nasional. Misalnya kerusuhan 27 Juli 1996, yang oleh para promotornya digembar-gemborkan sebelumnya akan membumihanguskan kota dengan membanjiri Jakarta dengan "kekuatan rakyat" (*people's power*). Ketika waktunya tiba para penggeraknya ternyata hanya mampu memobilisasikan tidak lebih dari beberapa ratus perusuh di tengah-tengah kota yang berpenduduk 12 juta jiwa. Peristiwa 27 Juli 1996, dan ke-

rusuhan-kerusuhan lain yang mengatasnamakan rakyat, menemukan kegagalan disebabkan oleh mengabaikan hal yang sama seperti pada masa lampau. Dalam semua kerusuhan tersebut, ABRI sebagai kekuatan politik yang paling solid tetap setia mendukung pemerintah yang sah dan umat Islam sebagai kelompok ternyata tidak berhasil dilibatkan, atau tidak mau melibatkan diri ke dalam perangkap kekacauan politik yang ada. Adanya orang Islam dalam berbagai kerusuhan lebih sebagai perorangan yang lepas ketimbang sebagai massa umat Islam yang utuh.

## Penutup

Meski ummat Islam di Indonesia tidak merupakan satu kelompok yang homogen, solid, dan terorganisasi namun sebagai suatu entitas budaya mereka dipersatukan oleh seperangkat nilai tertentu. Skala ketahanan nasional akan dapat terpengaruh secara serius bila nilai-nilai yang dimuliakan oleh masyarakat pengemban budaya Islam dinilai terancam, seperti halnya yang pernah dilalui pada masa kolonial Belanda, pendudukan Jepang, munculnya ancaman atheisme PKI, atau karena adanya usaha-usaha yang mereka curigai ingin melakukan sekularisasi

terhadap nilai-nilai Islam, dan sebagainya. Selama nilai-nilai tersebut tidak diganggu gugat, kemungkinan munculnya ancaman terhadap ketahanan nasional yang berasal dari umat Islam dapat diabaikan.

Oleh karena itu, dari sudut pandang paham Pancasila dan wawasan nasional, adalah mutlak penting dikembangkannya sikap politik yang didasarkan pada saling percaya dalam rangka memelihara hubungan yang serasi antara kelompok-kelompok politik serta sosial budaya yang ada. Perlu dibangun kemampuan untuk mengelola konflik yang mungkin timbul di antara kekuatan-kekuatan yang ada. Dalam pengelolaan konflik tersebut tidak perlu ada pretensi untuk harus menyelesaikan semua konflik yang ada. Dalam hal ada kondisi yang belum memungkinkan untuk membangun kesepakatan, paling tidak harus ada kesediaan menerima prinsip

“setuju untuk tidak bersepakat”.

Sebaliknya bila hubungan saling percaya sampai mengalami gangguan, akibat keteledoran, atau lantaran kecurigaan, apalagi bila konflik yang timbul sampai kepada mengalienasikan dan memarjinalisasikan kelompok-kelompok tertentu, lebih-lebih bila tindakan itu ditujukan kepada kelompok sosial kultural terbesar - umat Islam - dari arus kehidupan sosial politik nasional, apa pun dalihnya, sungguh tidak dapat dibenarkan karena akan sangat merugikan pembinaan ketahanan nasional pada skala prima yang kita dambakan. Dari pengamatan empirik selama ini kita menemukan kenyataan bahwa kualitas ketahanan nasional akan berada pada skala prima hanya dengan kondisi bila terdapat hubungan yang harmoni dan akrab antara dua kekuatan terpenting, yaitu ABRI dan umat Islam.